

# LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN MAGELANG

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**Bab I  
Pendahuluan**

**1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD**

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Catatan Atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca sehingga Catatan Atas Laporan Keuangan penyusunan CALK diharapkan dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi secara keseluruhan. Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

**1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD**

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
13. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Amortisasi Aset Tak Berwujud.
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 14 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
17. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/554/KEP/23/2017 Tentang Saldo Awal Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.

### **1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan**

Sistematika catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Magelang
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Magelang
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Magelang

#### **Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Magelang**

- 2.1. Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

## Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

### 3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD

- 3.1.1. Pendapatan
- 3.1.2. Beban
- 3.1.3. Belanja
- 3.1.4. Perubahan Ekuitas
- 3.1.5. Aset
- 3.1.6. Kewajiban
- 3.1.7. Dana

3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab IV. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab V. Penutup

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

**2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Magelang per 31 Desember 2017 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
	Belanja Pegawai	2.092.266.000,-	1.864.407.152,-	89,11	227.858.848,-
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
	Belanja Pegawai	32.222.500,-	30.018.100,-	93,15	2.204.400,-
	Belanja Barang dan Jasa	2.141.637.300,-	1.920.671.750,-	89,68	220.965.550,-
	Belanja Modal	640.885.200,-	619.064.800,-	96,60	21.820.400,-
	<b>Jumlah</b>	<b>4.907.011.000,-</b>	<b>4.434.161.802,-</b>	<b>90,36</b>	

**3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, SKPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Magelang menghadapi beberapa hambatan dan kendala yaitu :

Untuk pencapaian target pendapatan, terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut:

1. Untuk TPP karena adanya potongan TPP untuk pegawai yang tidak masuk kerja.
2. Untuk penerimaan honor karena adanya rangkap jabatan dalam tim dan adanya anggota tim yang sedang diklat sehingga tidak masuk selama 15 hari kerja atau 20 hari kalender. Untuk uang saku karena menyesuaikan kehadiran peserta rapat.
3. Untuk kegiatan RDTR tidak dilaksanakan karena masih menunggu ditetapkannya Perubahan Perda RTRW.
4. Untuk kegiatan KUA PPAS karena untuk tahun 2017 belum ditetapkan.

### BAB III

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

### 3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

##### Penjelasan Pos- Pos Laporan Realiasi Anggaran SKPD

#### 3.1.1. Pendapatan

Nihil

#### 3.1.2. Belanja

Belanja Anggaran Pendapatan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp 231.967.731.505 dan terealisasi sebesar Rp 205.923.853.882 yang terdiri dari :

##### a. Belanja operasi Rp 3.815.097.002,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, dengan rincian:

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	2.124.488.500	1.894.425.252	89,17
2	Belanja Barang dan Jasa	2.141.637.300	1.920.671.750	89,68
	<b>Jumlah</b>	<b>4.266.125.800</b>	<b>3.815.097.002</b>	<b>89,43</b>

##### a.1. Belanja pegawai Rp 1.894.425.252,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja pegawai tidak langsung dan langsung periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, dengan rincian:

##### Belanja tidak langsung

Belanja Pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan, penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS dan Biaya pemungutan pajak daerah.

Dianggarkan sebesar	:	2.092.266.000,-
Realisasi sebesar	:	1.865.155.422,-
Kurang dari anggaran sebesar	:	<u>227.110.578</u>
Atau terealisasi sebesar %		89,14%

### Belanja langsung

Belanja Pegawai langsung digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dan uang lembur dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Magelang

Dianggarkan sebesar	:	32.222.500,-
Realisasi sebesar	:	30.018.100,-
Kurang dari anggaran sebesar	:	<u>2.204.400,-</u>
Atau terealisasi sebesar %		86,78%

#### a.2. Belanja barang dan jasa Rp 1.920.671.750,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.920.671.750,00 digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Magelang. Mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, penjilidan, sewa gedung, jasa konsultasi, makan dan minum, perjalanan dinas.

#### b. Belanja modal Rp 619.064.800,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja modal periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, dengan rincian:

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tanah	45.000.000	44.476.000	98,84
2	Belanja Peralatan dan Mesin	545.885.200	534.053.800	97,83
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Belanja Aset Lainnya	50.000.000	40.535.000	81,07
	<b>Jumlah</b>	<b>640.885.200</b>	<b>619.064.800</b>	<b>96,60</b>

## Penjelasan Pos- Pos laporan Operasional

### 3.2. 1. Pendapatan- LO

#### Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Realisasi 2017 (Rp)
1	Pajak Daerah	-
2	Retribusi Daerah	-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-
	<b>JUMLAH</b>	-

### 3.2.2 Beban – LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2017 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terealisasi sebesar Rp 1.894.425.252,00. Beban Pegawai LO terdiri dari beban pegawai dan Uang lembur .Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2017 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2017.

#### b. Beban Persediaan

Beban Persediaan yaitu beban yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor. Beban persediaan tahun 2017 sebesar Rp.64.075.470,-

#### c. Beban jasa

Beban Jasa yaitu beban yang terkait baik dengan kebutuhan operasional kantor dan kegiatan pelayanan utama/tusi utama suatu instansi. Beban jasa pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.375.102.290,-

#### d. Beban pemeliharaan

Beban Pemeliharaan yaitu beban yang digunakan untuk pemeliharaan Aset Tetap atau Aset Lainnya milik suatu instansi atau yang dipergunakan oleh suatu instansi. Beban pemeliharaan tahun 2017 Rp.161.847.959,-

#### e. Beban perjalanan dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional instansi maupun yang berhubungan dengan tusi utama suatu instansi. Beban perjalanan dinas tahun 2017 sebesar Rp.315.675.596,-

#### f. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 215.634.739,02

### 1. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2017 sebesar Rp0,00.

## 2. Pos Luar Biasa

Pos luar Biasa pada tahun 2017 sebesar Rp0,00.

## 3. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2017 defisit sebesar Rp (4.026.761.306,02)

### Penjelasan Pos- Pos Laporan Perubahan Ekuitas

#### 3.3.1.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal entitas akuntansi diperoleh dari saldo akhir neraca DPRKP Tahun 2017 (audited) sebesar Rp 0,-

#### 3.3.1.2 Surplus/Defisit – LO

Berdasarkan Laporan Operasional DPRKP tercatat sebesar Rp 4.029.541.306,02.-

#### 3.3.1.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya tercatat Rp 1.995.753.594,84. Koreksi ekuitas merupakan koreksi nilai pada aset hasil dari pembelian tahun berjalan, inventarisasi, mutasi, dan reklasifikasi aset sesuai berita acara yang di terbitkan Bidan Aset DPPKAD Kab.Magelang.

#### 3.3.1.4 Ekuitas Akhir

Total ekuitas akhir tercatat Rp 2.400.374.090,82. Hasil tersebut merupakan surplus defisit – LO dan koreksi ekuitas lainnya.

### Penjelasan pos-pos neraca SKPD

#### 3.4.1. Aset

Aset SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang per 31 Desember 2017 terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya.

	Tahun 2017	Tahun 2016
a. Aset Lancar	<u>Rp.5.611.310,00</u>	<u>Rp.0,00</u>

Aset Lancar meliputi Persediaan.

	Tahun 2017	Tahun 2016
a.1. Kas di Bendahara Penerimaan	<u>Rp. 0,00</u>	<u>Rp. 0,00</u>

Saldo kas yang masih ada di Bendahara Penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 0,00 sedangkan untuk tahun 2017 sebesar Rp 0,00.

	Tahun 2017	Tahun 2016
a.2. Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>Rp.0,00</u>	<u>Rp. 0,00</u>

Adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Pengeluaran tahun 2017 sebesar Rp 0,00

	Tahun 2017	Tahun 2016
a.3 Piutang/Tagihan Kepada	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Pihak ke Tiga

	Tahun 2017	Tahun 2016
a.4 Beban dibayar dimuka	Rp. 0,00	Rp 0,00

	Tahun 2017	Tahun 2016
a.5. Persediaan	Rp 5.611.310,00	Rp 0,00

Merupakan persediaan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Nilai persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 5.611.310,00, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2017	Tahun 2016
ATK	2.303.510	0
Cetakan	2.640.300	0
Alat Kebersihan	74.000	0
Alat Listrik	533.500	0
Benda Pos	60.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp5.611.310</b>	<b>Rp. 0,00</b>

	Tahun 2017	Tahun 2016
b. Aset Tetap	Rp . 2.360.442.405,82	Rp 0,00

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten menerapkan penyusutan barang milik daerah, dengan hasil sebagai berikut:

Aset tetap:	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Tanah	145.725.000,00	-
Peralatan dan Mesin	936.307.579,00	-
Akumulasi Penyusutan	527.304.820,50	-
Nilai Buku	409.002.758,50	-
Gedung dan Bangunan	1.758.468.574,00	-
Akumulasi Penyusutan	71.289.926,68	-
Nilai Buku	1.687.178.647,32	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	148.170.000,00	-
Akumulasi Penyusutan	29.634.000,00	-
Nilai Buku	118.536.000,00	-
Aset Tetap Lainnya	0	-
Akumulasi Penyusutan	0	-
Nilai Buku	0	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>2.988.671.153,00</b>	<b>-</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>628.228.747,18</b>	<b>-</b>
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>2.360.442.405,82</b>	<b>-</b>



Jumlah	0,00	1.088.057.579,00	151.750.000,00	936.307.579,00	527.304.820,50	409.002.758,50
--------	------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2017. Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp 1.088.057.579,00 pengurangan sebesar Rp 151.750.000,00 merupakan hasil inventarisasi aset Rekon B dan Rekon C dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp 521.744.820,50. Saldo akhir setelah penyusutan Tahun 2017 sebesar Rp 527.304.820,50,-

Perincian penambahan alat kantor dan Rumah Tangga sebagai berikut :

No	Uraian	Unit	Harga Satuan	Total
1.	<i>Alat Angkutan</i>			
	Station Wagon	1	151.750.000	151.750.000
	Station Wagon	1	111.340.000	111.340.000
	Station Wagon	1	65.800.000	65.800.000
	Sepeda motor	1	14.250.000	14.250.000
	Sepeda motor	1	19.690.000	19.690.000
	Sepeda motor	1	14.174.000	14.174.000
	Sepeda motor	2	32.533.300	65.066.600
	Sepeda motor	1	14.407.550	14.407.550
	Sepeda motor	1	8.500.000	8.500.000
	Sepeda motor	1	10.250.000	10.250.000
	Sepeda motor	1	18.284.000	18.284.000
	Sepeda motor	2	19.020.494	38.040.988
	Gerobak sampah beroda	6	3.646.500	21.879.000
	Bak sampah beroda	54	847.000	45.738.000
2	<i>Alat Ukur</i>			
	GPS	2	13.045.900	26.091.800
3	<i>Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>			
	Kursi	11	45.122	15.245.000
	Tangga Zice	1	7.500.000	7.500.000
	Meja ½ biro	1	300.000	300.000
	Unit power supply	1	668.250	668.250
	Unit power supply	1	606.000	606.000
	Laptop	1	4.866.000	4.866.000
	Note Book	1	14.732.500	14.732.500
	CPU	1	3.500.000	3.500.000
	CPU	1	7.474.000	7.474.000
	CPU	1	8.043.500	8.043.500
	Monitor	1	1.200.000	1.200.000
	Monitor	1	986.500	986.500
	Printer	1	1.400.000	1.400.000
	Printer	1	1.110.000	1.110.000
	Meja pejabat eseleon II	1	125.000	125.000
	Kursi kerja pejabat eseleon II	1	1.900.000	1.900.000
	Kursi kerja pejabat eseleon IV	3	2.468.250	7.404.750
	Note Book	1	11.165.000	11.165.000
	Note Book	1	10.192.750	10.192.750
	Note Book	1	11.970.250	11.970.250

	Printer	1	6.900.000	6.900.000
	Printer	2	2.145.000	4.290.000
	Filling besi / metal	6	300.000	1.800.000
	Lemari kaca	1	130.000	130.000
	Lemari kayu	4	125.000	500.000
	Zice	1	200.000	200.000
	Kipas angin	2	180.000	360.000
	Band kas	1	729.000	729.000
	Meja ½ biro	2	715.000	1.430.000
	Kursi lipat	16	315.687	5.050.992
	Kursi kerja pejabat eseleon III	1	1.090.000	1.090.000
	Zice	1	1.823.970	1.823.970
	Meja komputer	1	208.374	208.374
	Meja ½ biro	26	500.000	13.000.000
	Meja pejabat eselon III	1	900.000	900.000
	AC split	1	4.900.000	4.900.000
	AC split	3	7.597.500	22.792.500
	AC split	1	2.942.500	2.942.500
	Mesin potong rumput	3	2.970.000	8.910.000
	Laptop	1	6.145.000	6.145.000
	Laptop	2	6.629.000	13.258.000
	Laptop	2	11.139.000	22.278.000
	Printer	3	6.915.733	20.747.199
	Meja rapat	3	3.554.000	10.662.000
	Meja rapat	1	3.454.000	3.454.000
	Lemari arsip	4	3.612.500	14.450.000
	Kursi eselon IV	6	4.505.000	27.030.000
	Meja ½ biro	12	2.942.500	35.310.000
	Kursi kerja	12	462.000	5.544.000
	Lemari arsip 2 pintu	6	3.014.000	18.084.000
	Meja rapat	12	1.248.500	14.982.000
	Kursi rapat	60	599.500	35.970.000
4	<i>Alat Studio dan Komunikasi</i>			
	Kamera	1	7.609.650	7.609.650
	Kamera	1	7.609.650	7.609.650
	LCD proyektor	1	14.396.500	14.396.500
	Canon EOS	1	3.936.750	3.936.750
	<b>J U M L A H</b>			<b>1.088.057.579,00</b>

		<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2016</b>
<b>b.3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.758.468.574,00</b>	<b>Rp 0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo sebelum penyusutan per 31 Desember 2017. Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.758.468.574,- pengurangan sebesar Rp 0,00 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp 71.289.926,68 sehingga saldo per 31 Desember 2017 setelah penyusutan sebesar Rp 1.687.178.647,32 Perinciannya sebagai berikut :

Jenis Aset	Saldo per 31 Des 2016	Penambahan TA.2017	Pengurangan TA.2017	Nilai Sebelum Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Saldo per 31 Des 2017
Bangunan Gedung	0,00	1.758.468.574,00	0,00	1.758.468.574,00	71.289.926,68	1.687.178.647,32
Bangunan Monumen						
Jumlah	0,00	1.758.468.574,00	0,00	1.758.468.574,00	71.289.926,68	1.687.178.647,32

	Tahun 2017	Tahun 2016
<b>b.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	Rp 148.170.000,00	Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo di neraca per 31 Desember 2017. Aset ini terdiri dari sumur dan pompa permanen. Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan Aset dari Belanja Modal tahun 2017 sebesar Rp148.170.000,00 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp 29.634.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2017 setelah penyusutan sebesar Rp 118.536.000,00. Perinciannya sebagai berikut :

Jenis Aset	Saldo per 31 Des 2016	Penambahan TA.2017	Pengurangan TA.2017	Nilai Sebelum Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Saldo per 31 Des 2017
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Air (irigasi)	0,00	148.170.000,00		148.170.000,00	29.634.000,00	118.536.000,00
Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

					0,00	
<b>Jumlah</b>	0,00	148.170.000,00		148.170.000,00	29.634.000,00	118.536.000,00

		<b>Tahun 2017</b>		<b>Tahun 2016</b>
<b>b.5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>	<b>Rp</b>	<b>0 ,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2017 dan 2016. Aset ini terdiri dari Buku dan Kepustakaan, Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan ,Hewan/ Ternak dan Tumbuhan. Pada Tahun Anggaran 2017terdapat penambahan Aset sebesar Rp,00dan pengurangan sebesar Rp 0,00 sehingga saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.,00. Perinciannya sebagai berikut :

Jenis Aset	Saldo per 31 Des 2016	Penambahan TA.2017	Pengurangan TA.2017	Saldo per 31 Des 2017
Buku dan Kepustakaan				
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan				
Hewan/ Ternak dan Tumbuhan				
Jumlah				

		<b>Tahun 2017</b>		<b>Tahun 2016</b>
<b>b.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

Pada Tahun 2017 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0,00 .

		<b>Tahun 2017</b>		<b>Tahun 2016</b>
<b>c. Aset Lainnya</b>	<b>Rp</b>	<b>30.401.250,00</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

Pada Tahun 2017nilai aset lainnya mengalami penambahan berupa aset tak berwujud sebesar Rp. 40.535.000,00. Dan nilai akumulasi amortisasi sebesar (Rp. 10.133.750,00)

		<b>Tahun 2017</b>		<b>Tahun 2016</b>
<b>c.1. Tagihan Piutang Angsuran</b>	<b>Rp</b>	<b>0 ,00</b>	<b>Rp</b>	<b>0 ,00</b>

Tahun 2017

Tahun 2016

c.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	,00	Rp ,00
		<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2016</b>
c.3. Aset tak Berwujud		Rp 40.535.000,00	Rp40.535.000,00

Pada tahun 2017 Aset tidak berwujud mengalami penambahan sebesar Rp. 40.535.000,00 berupa Software untuk Pengadaan Sistem Pendataan RTLH sehingga saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 40.535.000,00

		<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2016</b>
c.4. Aset Lain-lain	Rp	0,00	Rp 0,00
		<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2016</b>
c.5. Akumulasi Amortisasi		(Rp.10.133.750,00)	Rp. 0,00

#### 5.1.4 Kewajiban

##### d. Kewajiban Jangka Pendek

		<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2016</b>
d.1. Hutang kepada Pihak Ketiga	Rp	0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo pajak-pajak yang belum dibayar pada tahun anggaran 2017 dan baru dibayarkan pada tahun 2017. Dengan perincian sebagai berikut :

Jenis pajak	Nilai	Jumlah
PPh 21	0	
PPh 23	0	
PPN	0	
PPh 22	0	0

		<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2016</b>
d.2. Hutang Jangka Pendek Lainnya	Rp	0 ,00	Rp 0 ,00

Merupakan kewajiban pemda kepada pihak ketiga atau pegawai yang belum selesai dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran.

##### d.3. Utang Beban

Merupakan beban pada tahun 2017 yang akan dibayarkan pada tahun 2018 sebesar Rp 1.640.875,00 terdiri dari :

Utang Listrik	Rp 901.909,00
Utang Telepon	Rp 666.981,00
Utang Air	Rp 71.985,00

#### 5.1.5. Ekuitas

	Tahun 2017	Tahun 2016
a. Ekuitas	<u>Rp 2.394.814.090,82</u>	<u>Rp.0,00</u>

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD.

#### 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

Untuk pengakuan pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan menggunakan Basis Kas, yaitu bahwa transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan atau dicatat pada saat uang diterima atau dibayarkan. Untuk pengakuan aset kewajiban dan ekuitas dalam neraca menggunakan Basis Akrual. Basis Akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian.

Laporan rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan dan pengurangan aset bersih dikarenakan penggunaan basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan Realisasi Anggaran.

## BAB IV

### Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan SKPD di Pemerintah Kabupaten Magelang, yang berdomisili di Jalan Soekarno Hatta No. 9 Kota Mungkid Kabupaten Magelang.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sesuai dengan Keputusan Bupati Magelang No. 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 48). yaitu sebagai berikut :

- 1) Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
- 2) Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
  - a. perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan kesekretariatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
  - g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### Penutup

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Magelang Tahun Anggaran 2017.

Kota Mungkid, Januari 2017

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN MAGELANG**



*Sutarno*

**Ir. SUTARNO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590420 199502 1 001

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Magelang terdiri a). Laporan Realisasi Anggaran; b) Neraca; c) Laporan Operasional; d) Laporan Perubahan Ekuitas; e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kota Mungkid, 30 Desember 2017

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN MAGELANG**



*Sutarno*

**Ir. SUTARNO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590420 199502 1 001